



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Yuni Veronika^{1*}, Yesi Mutia Basri², Rofika³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail: @yuniveronika08@gmail.com

Abstract

This study aims to determine at the effect of apparatus competence, organizational commitmen, community participation, accountability, and transparancy on village financial management. The population in this study was 242 villages in Kampar Regency. The sample used was a sample of 71 villages with a total of 284 respondents using the propoportional stratified random sampling method. This study uses primary data using a questionnaire. The analytical method used in this research in linear multiple regression analysis. The analytical tool used in this study is Product Statistics and Service Solution (SPSS) version 21.0. The results of this study indicate that transparency, accountability, community participation, quality of human resources and village financial management.

Keywords: Competence, Organizational Commitmen, Community Participation, Accountability, Transparency and Village Financial Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Populasi dalam penelitian ini adalah 242 Desa di Kabupaten Kampar. Sampel yang digunakan yaitu berjumlah 71 desa dengan total 284 responden dengan menggunakan metode proportional stratified random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur, Komitmen Organiasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Keuangan Desa

Informasi Artikel

Diterima : 29/05/2023

Review Akhir : 31/10/2023

Diterbitkan online : 10/2023

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur, serta mengurus daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi memberikan memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemerintah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan atau tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Kristo Relianus (Fasilitator Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pada tahun 2016, mengungkapkan masalah keuangan desa; *pertama*, keterbatasan regulasi, kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan desa. *Kedua*, ketiadaan anggaran, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan design dan RAB. *Ketiga*, kurang kapasitas dan personalia, mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga *stakeholder*, untuk itu desa perlu seseorang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. *Keempat*, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran.

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa yakni belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyeenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta perencanaan juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa (www.dpr.go.id).

Muslimin B. Putra (Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulsel) mengemukakan potensi maladminitrasi dalam pengelolaan dana desa yaitu pemerintah desa tidak profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ penggunaan dana desa, realitas pencairan dana desa sering tertunda disebabkan penyusunan APBDes tahun berjalan serta laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya yang belum

sesuai karena kepala desa dan aparat kurang profesional dalam melakukan penyusunan sesuai batas waktu yang ditetapkan (ombudsman.go.id).

ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mengungkapkan bahwa tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015, 41 kasus tahun 2016, 96 kasus. Tahun 2017, dan 27 kasus tahun 2018 yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Di Kabupaten Kampar terdapat isu akuntabilitas yang menjadi salah satu asas pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa Lubuk Agung XIII Koto Kampar diduga selewengkan dana desa, bumdes, dan proyek dana pembangunan infrastruktur. Selain itu, di Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir, kepala desa terbukti melakukan korupsi atas Alokasi Dana Desa yang dikucurkan dari APBD tahun 2016 sebesar Rp 316 juta. Saat ini ada permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar. Pada tahap perencanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tidak melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa (Martias, 2018).

Pada tahap pelaksanaan, hampir setiap desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tidak membuat grafik informasi di depan kantor desa, kepala desa tidak membuat papan informasi dan batu prasasti setiap kegiatan, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran dana desa, karena tidak mengetahui berapa dana yang masuk dari propinsi dan berapa dana yang masuk dari kabupaten (suaralira.com). Selain itu, di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pekerjaan fisik yang menggunakan dana desa Tahun 2019 tidak dilengkapi dengan papan nama dan rapat musrembangdes hanya melibatkan aparat-aparat desa (kabarinvestigasi.co.id).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 39 disebutkan bahwa kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat: (1) APB Desa; (2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; (3) Alamat pengaduan. Informasi mengenai APB Desa di depan kantor desa bertujuan untuk agar seluruh masyarakat dapat memonitoring kegiatan yang di programkan pemerintah, membangun infrastruktur tertinggal, sekaligus untuk membangun kelancaran perekonomian masyarakat. Muhammad (Kadis Inspektorat) menyatakan pengelolaan dana desa harus jelas, transparan dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Salah satu wujud transparansi, APB Desa harus di publikasikan.

Pada tahap pertanggungjawaban, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2017 terdapat delapan desa yang belum menyampaikan laporan realisasi APB Desa yaitu Desa Tabing, Desa Sepungguk, Desa Pancuran Gading, Desa Tanjung Sawit, Desa Batu Gajah, Desa Muara Jalai, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan dengan dana yang dikelola sebesar Rp9.450.251.500. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Desa Koto Perambahan yang belum disetorkan ke kas desa atau belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 401.212.047. Selain itu, terdapat juga kegiatan yang belum/tidak direalisasikan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan badan jalan Dusun Jawi-Jawi 1.500 x 7m sebesar Rp 145.895.502
- 2) Rabat beton Dusun Jawi-Jawi 350x2,5x0,07m sebesar Rp 76.959.900
- 3) Insentif Guru PAUD dan Guru TPA sebesar Rp 24.000.000
- 4) Penyertaan modal BUMDES sebesar Rp 60.000.000
- 5) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 15.300.000

Berdasarkan hasil konfirmasi dan pengakuan oleh mantan Kades Koto Perambahan, sisa kas desa sebesar Rp 401.212.047 tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran atas kegiatan-kegiatan

yang telah terlaksana namun tidak dianggarkan dalam APBDes dan sebagian untuk kepentingan pribadi.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Heider, F (1958), terdapat 3 hal yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider, F (1958) yaitu:

- 1) Seseorang harus mampu melihat dan mengamati suatu perilaku
- 2) Seseorang harus yakin bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- 3) Seseorang harus menentukan apakah orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak

Teori atribusi ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana cara dalam menilai individu secara berbeda, tergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menjelaskan tentang penyebab perilaku orang lain ataupun dirinya sendiri yang akan ditentukan baik secara internal misalnya sifat, karakter, dan perilaku maupun yang ditentukan secara eksternal dianggap misalnya, tekanan situasi atau keadaan yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Robbins dan Timothy, 2008:177).

Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Teori atribusi mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Kesan yang terbentuk dapat ditarik kesimpulan sebagai faktor yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Kampar yang berjumlah 242 desa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 desa yang diambil dengan metode *proportional stratified random sampling*.

Tabel 1. Daftar Populasi Penelitian

No	Status Desa	Jumlah Desa	Range IDM
1	Mandiri	1 Desa	($>$) dari 0,8155
2	Maju	24 Desa	(\leq) 0,8155 dan ($>$) dari 0,7072
3	Berkembang	148 Desa	(\leq) 0,7072 dan ($>$) dari 0,5989
4	Tertinggal	52 Desa	(\leq) 0,5989 dan ($>$) dari 0,4907
5	Sangat Tertinggal	17 Desa	(\leq) dari 0,4907
Total Desa		242 Desa	

Sumber: Dinas PMD Riau

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pihak yang berkaitan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat. Defenisi operasional pada dasarnya merupakan

batasan terhadap pengertian yang memaparan lebih detail ciri-ciri spesifik sehingga dijadikan pedoman dalam melakukan suatu penelitian.

Tabel 2. Defenisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi	indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap perencanaan • Tahap penatausahaan • Tahap pelaksanaan • Tahap pelaporan • Tahap pertanggungjawaban 	Likert
Kompetensi Aparatur (X ₁)	Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan Wibowo (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Kemampuan • sikap 	Likert
Komitmen Organisasi(X ₂)	Komitmen organisasi sebagai 1) keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi, 2)keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, 3)keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (Luthans, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> • kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai-nilai organisasi • kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama organisasi • keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi 	Likert
Partitipasi Masyarakat(X ₃)	Tilaar (2009) partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (<i>bottom up</i>) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya	<ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan dalam perencanaan • keterlibatan dalam perencanaan • keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil 	Likert
Akuntabilitas(X ₄)	Kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan mengungkapkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa • keterlibatan oleh tim pelaksana • adanya laporan pertanggungjawaban 	Likert

Transparansi(X ₅)	<p>Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan.</p> <p>(Mardiasmo, 2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • informatif (<i>Informativeness</i>) • keterbukaan (<i>Openess</i>) • pengungkapan (<i>Disclouser</i>) 	Likert
-------------------------------	---	---	--------

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan deskriptif terhadap suatu data meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Adapun hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Desa	272	46,00	138,00	102,313	25,819
Kompetensi Aparatur	272	16,00	58,00	43,901	10,059
Komitmen Organisasi	272	29,00	83,00	64,779	16,616
Partisipasi Masyarakat	272	9,00	23,00	17,761	4,153
Akuntabilitas	272	20,00	30,00	24,581	2,474
Transparansi	272	18,00	45,00	31,915	7,342
Valid N (listwise)	272				

Sumber data: Ouput SPSS

Dari tabel ouput tersebut menunjukkan bahwa data (valid N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 272 sampel berasal dari hasil kuesioner yang disebarkan peneliti padadesa di Kabupaten Kampar. Berdasarkan sampel tersebut maka semua data dapat diolah. Variabel pengelolaan keuangan desa (Y) diatas menggunakan kuesioner dengan skala likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Skor yang paling tinggi adalah 5 (sangat setuju), dan skor terendah adalah 1 (sangat tidak setuju). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 138.00 dan 46.00. selain itu standar deviasi sebesar 25,81887 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 102,3125 dimana kuesioner pengelolaan keuangan desa, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel kompetensi aparatur (X₁) yang diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert. Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 58,00 dan 16,00. selain itu standar deviasi sebesar 10,05929 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 43,9007 dimana kuesioner kompetensi aparatur, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel komitmen organisasi (X₂). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 83.00 dan 29.00. selain itu standar deviasi sebesar 16,61600 menunjukkan bahwa

sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 64,7794 dimana kuesioner komitmen organisasi, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 23.00 dan 9.00. selain itu standar deviasi sebesar 4,15274 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 17,7610 dimana kuesioner partisipasi masyarakat, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel akuntabilitas (X_4). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 30.00 dan 20.00. selain itu standar deviasi sebesar 2,47364 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 24,5809 dimana kuesioner akuntabilitas, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel transparansi (X_5). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 45.00 dan 18.00. selain itu standar deviasi sebesar 7,34220 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 31,9154 dimana kuesioner transparansi, data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan terhadap semua variabel penelitian sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Porson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan.

Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pada penelitian ini untuk variabel pengelolaan keuangan desa menggunakan 29 pernyataan. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel dibawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh r hitung > r tabel yang berarti data valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	0.810	0.29412	Valid	Y16	0.787	0.29412	Valid
Y2	0.840	0.29412	Valid	Y17	0.840	0.29412	Valid
Y3	0.850	0.29412	Valid	Y18	0.853	0.29412	Valid
Y4	0.744	0.29412	Valid	Y19	0.742	0.29412	Valid
Y5	0.604	0.29412	Valid	Y20	0.608	0.29412	Valid
Y6	0.786	0.29412	Valid	Y21	0.779	0.29412	Valid
Y7	0.679	0.29412	Valid	Y22	0.675	0.29412	Valid
Y8	0.754	0.29412	Valid	Y23	0.787	0.29412	Valid
Y9	0.810	0.29412	Valid	Y24	0.787	0.29412	Valid
Y10	0.840	0.29412	Valid	Y25	0.840	0.29412	Valid
Y11	0.809	0.29412	Valid	Y26	0.853	0.29412	Valid
Y12	0.742	0.29412	Valid	Y27	0.740	0.29412	Valid
Y13	0.608	0.29412	Valid	Y28	0.612	0.29412	Valid
Y14	0.779	0.29412	Valid	Y29	0.786	0.29412	Valid
Y15	0.675	0.29412	Valid				

Sumber: *Output* SPSS

Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur (X₁)

Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi aparatur menggunakan 12 pernyataan. Adapun hasil uji dapat dilihat pada tabel 5. Dari tabel dibawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang berarti data valid

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur

Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0.900	0.29412	Valid
X1.2	0.799	0.29412	Valid
X1.3	0.798	0.29412	Valid
X1.4	0.773	0.29412	Valid
X1.5	0.688	0.29412	Valid
X1.6	0.641	0.29412	Valid
X1.7	0.588	0.29412	Valid
X1.8	0.838	0.29412	Valid
X1.9	0.911	0.29412	Valid
X1.10	0.807	0.29412	Valid
X1.11	0.814	0.29412	Valid
X1.12	0.784	0.29412	Valid

Sumber: *Output SPSS*

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (X₂)

Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi aparatur menggunakan 18 pernyataan. Adapun hasil uji dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel dibawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang berarti data valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi

	R Hitung	R Tabel	Keterangan		R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0.884	0.29412	Valid	X2.10	0.779	0.29412	Valid
X2.2	0.829	0.29412	Valid	X2.11	0.779	0.29412	Valid
X2.3	0.892	0.29412	Valid	X2.12	0.884	0.29412	Valid
X2.4	0.807	0.29412	Valid	X2.13	0.829	0.29412	Valid
X2.5	0.754	0.29412	Valid	X2.14	0.892	0.29412	Valid
X2.6	0.860	0.29412	Valid	X2.15	0.807	0.29412	Valid
X2.7	0.675	0.29412	Valid	X2.16	0.754	0.29412	Valid
X2.8	0.822	0.29412	Valid	X2.17	0.860	0.29412	Valid
X2.9	0.757	0.29412	Valid	X2.18	0.884	0.29412	Valid

Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X₃)

Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi aparatur menggunakan 5 pernyataan. Adapun hasil uji dapat dilihat pada tabel 7. Dari tabel dibawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh r hitung > r tabel yang berarti data valid

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X3.1	0.923	0.29412	Valid
X3.2	0.706	0.29412	Valid
X3.3	0.875	0.29412	Valid
X3.4	0.701	0.29412	Valid
X3.5	0.685	0.29412	Valid

Sumber : *Output SPSS*

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X₄)

Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi aparatur menggunakan 18 pernyataan. Dari tabel di bawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh r hitung > r tabel yang berarti data valid

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X4.1	0.707	0.29412	Valid
X4.2	0.559	0.29412	Valid
X4.3	0.785	0.29412	Valid
X4.4	0.655	0.29412	Valid
X4.5	0.547	0.29412	Valid
X4.6	0.695	0.29412	Valid

Sumber: *Output SPSS*

Hasil Uji Validitas Transparansi (X₅)

Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi aparatur menggunakan 18 pernyataan. Dari tabel di bawah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut diperoleh r hitung > r tabel yang berarti data valid

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Transparansi

Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X5.1	0.663	0.29412	Valid
X5.2	0.820	0.29412	Valid
X5.3	0.746	0.29412	Valid
X5.4	0.828	0.29412	Valid
X5.5	0.685	0.29412	Valid
X5.6	0.691	0.29412	Valid
X5.7	0.844	0.29412	Valid
X5.8	0.689	0.29412	Valid
X5.9	0.689	0.29412	Valid

Sumber: *Output SPSS*

Hasil Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reabilitas adalah *cronbach alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reabilitasnya.

Tabel 10. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengelolaan keuangan desa	0,760
Kompetensi aparatur	0,775
Komitmen organisasi	0,771
Partisipasi masyarakat	0.802
Akuntabilitas desa	0.762
Transparansi	0.776

Sumber : *Output SPSS*

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-smirnov dengan kriteria pengujian α 0,05. Berdasarkan hasil uji melalui SPSS diperoleh λ sig pada uji kolmogorov-smirnov sebesar $0.113 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflating factor* (VIF).

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		Ket
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
Kompetensi aparatur	0.267	3.747	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Komitmen organisasi	0.149	6.722	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Partisipasi masyarakat	0.275	3.639	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Akuntabilitas	0.834	1.199	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Transparansi	0.219	4.569	Tidak Terdapat Multikolinearitas

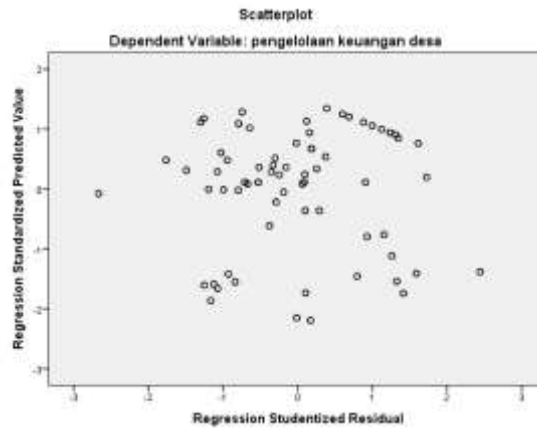
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : *Output SPSS*

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan *scatterplot* yang dihasilkan melalui olah data SPSS

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa pengujian heterokedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap dependen, persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji melalui SPSS diperoleh nilai Adjusted R Square 0.813 artinya adalah bahwa sumbangan (X1), (X2), (X3), (X4), (X5) terhadap (Y) adalah sebesar 81.3%, sedangkan sisanya 18.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal tersebut bisa menjadi implikasi bagi peneliti selanjutnya untuk menjelaskan variabel tersebut.

Hasil Uji Parsial T (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi) terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan desa) secara individu atau parsial dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan dan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat signifikasinsinya.

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (T)

Variabel independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Kompetensi aparatur	0,549	4,202	1,969	0,000	Berpengaruh
Komitmen organisasi	0,419	3,958	1,969	0,000	Berpengaruh
Partisipasi masyarakat	1,258	4,033	1,969	0,000	Berpengaruh
Akuntabilitas	1,419	4,722	1,969	0,000	Berpengaruh
transparansi	0,902	4,565	1,969	0,000	Berpengaruh

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 12 dapat disimpulkan:

1. pengujian hipotesis 1: pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} (4,202) > t_{tabel}$ dan sig 0,0000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa
2. pengujian hipotesis 2: pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} (3,958) > t_{tabel}$ dan sig 0,0000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa
3. pengujian hipotesis 3: pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} (4,033) > t_{tabel}$ dan sig 0,0000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa
4. pengujian hipotesis 4: pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} (4,722) > t_{tabel}$ dan sig 0,0000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa
5. pengujian hipotesis 5: pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa $t_{hitung} (4,565) > t_{tabel}$ dan sig 0,0000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kelima yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima variabel yang dianalisis terbukti bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kabupaten Kampar.

Peneliti selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut dengan populasi yang lebih banyak dan menambah variabel lain sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

KETERBATASAN DAN SARAN

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga masih dapat melakukan mediasi atau moderasi terhadap variabel lainnya.
2. Penelitian ini hanya mencakup pada pemerintah desa Kabupaten Kampar saja sehingga hasil penelitian belum mampu menggambarkan kondisi yang menyeluruh yang terjadi pada pemerintah desa di kabupaten lainnya.

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan mediasi atau moderasi dengan variabel lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta responden penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Michael, 1999. *The Art of HRD: Human Resource Management (Vol 2)*, Crest Publishing House, London
- Astini, Yuli., Agus Khazin Fauzi, dan Widowati, 2019. *Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa*, Valid Jurnal Ilmiah, Volume 16 Nomor 1, 29-47
- Bastian, Indra, 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Didjaja, Mustofa, 2003. *Transparansi Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Ferina, Ika Sasti., Burhanuddin, dan Herman Lubis, 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.4 No. 3, 322-336
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Halim, Rahmawati, 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan*, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 4 No. 1, 816-829
- Isbandi, Rukminto A, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Penerbit FISIP UI Press, Depok
- Ingarianti, Tri Muji, 2015. *Pengembangan Alat Ukur Komitmen Organisasi*, Jurnal RAP UNP, Vol. 6 No. 1, 80-91
- Julianto, I Putu dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2019. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa, Serta Komitmen*

- Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.4 No. 1, Hal 24-42
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Karim, Siti Aminah H, et.al, 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa*, Agribusiness Journal, Volume 13 Nomor 2, 18-24
- KPK, 2015. Laporan Kajian Sistem, *Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*
- Lubis, Arfan Ikhsan, 2010. *Akuntansi Keperilakukan Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Moehersono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mowday, R. T., R. M. Steers., dan L.W. Porter, 1979. *The Measurement Of Organizational Commitmen*, Journal Of Vocational Behavior, 1-46
- Medianti, Larastika, 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*, JOM FEB, Volume 1 Edisi 1,1-13
- Palan, R, 2007. *Competency Management Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*, Penerbit PPM, Jakarta Pusat
- Priyatno, Duwi, 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Edisi kesatu, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Prihadi, Syaiful F., 2004. *Assesment Centre (Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi)*. Penerbit SUN, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahardjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahma, Siti Susanti, 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*, JOM FEB, Volume 6 Edisi 1, 1-12
- Relianus, Kristo. 2016. *Masalah Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>, di akses 09 Desember 2019.
- Sujianto dan Sofyan, 2017. *Transformasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit UR Press, Pekanbaru
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Spencer, Lyle, M. Jr dan Signe M Spencer, 1993. *Competence at Work*, Jhon Wiley & Sons Inc, New York
- Sukmawati, Fitri dan Alfi Nurfitriani, 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut*, Jurnal Ilmiah Bisnis, Volume 2 Nomor 1, 52-66

- Syamsi, Syahrul, 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vo. 3 No.1, 21-28
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tyas, Zela Prabawaning, 2013. *Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sumenep) Tahun 2013*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Umami, Risyana dan Idang Nurodin, 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 6 Edisi 1, 74-80
- Umar, Haryono., Sidin Usman, dan Rahima Br. Purba, 2018. *The Influence Of Internal Control and Competence Of Human Resource On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Report*, International Journal Of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Voume 9 Issues 7, 1523-1531
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2010. *Budaya Organisasi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widyatama, Arif., Lola Novita, dan Diarespati, 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI), Volume 2 Nomor 2, 1-20
- Kabarinvestigasi.co.id. 2019. *Masyarakat Desa Batu Gajah Kampar Pertanyakan Beberapa Item Proyek Pembangunan*. <http://www.kabarinvestigasi.co.id/riau/kampar/masyarakat-desa-batu-gajah-kampar-pertanyakan-beberapa-item-proyek-pembangunan>, diakses 10 Desember 2019.
- Muhammad. 2019. *Kadis Inspektorat Kampar Himbau Kepala Desa Agar Transparan Menggunakan DD dan ADD*. Diakses 20 Desember 2019. <http://suaralira.com/mobile/detailberita/18828/kadis-inspektorat-kampar-himbau-kepala-desa-agar-transparan-menggunakan-dd-dan-add>
- Putra, Muslimin B. *Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>, diakses 06 Desember 2019.
- Primayoga, Egi. 2019. *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>, diakses 01 Desember 2019.
- Sartono. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>, diakses 08 Desember 2019.
- Yudhistira, Agus Ananta. *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Tangkap di Purwokerto*. Diakses 12 Desember 2019. <https://riaulink.com/news/detail/6367/korupsi--dana-desa-mantan-kades-di-kampar-ditangkap-di-purwokerto>